



LAPORAN KEGIATAN

**PERTEMUAN VIRTUAL "47TH SESSION OF THE STEERING COMMITTEE
OF THE PARLIAMENTARY CONFERENCE ON THE TWO"**

(VIRTUAL MEETING, 15 APRIL 2021)



**BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN
DEWAN PERWAKILAN INDONESIA**



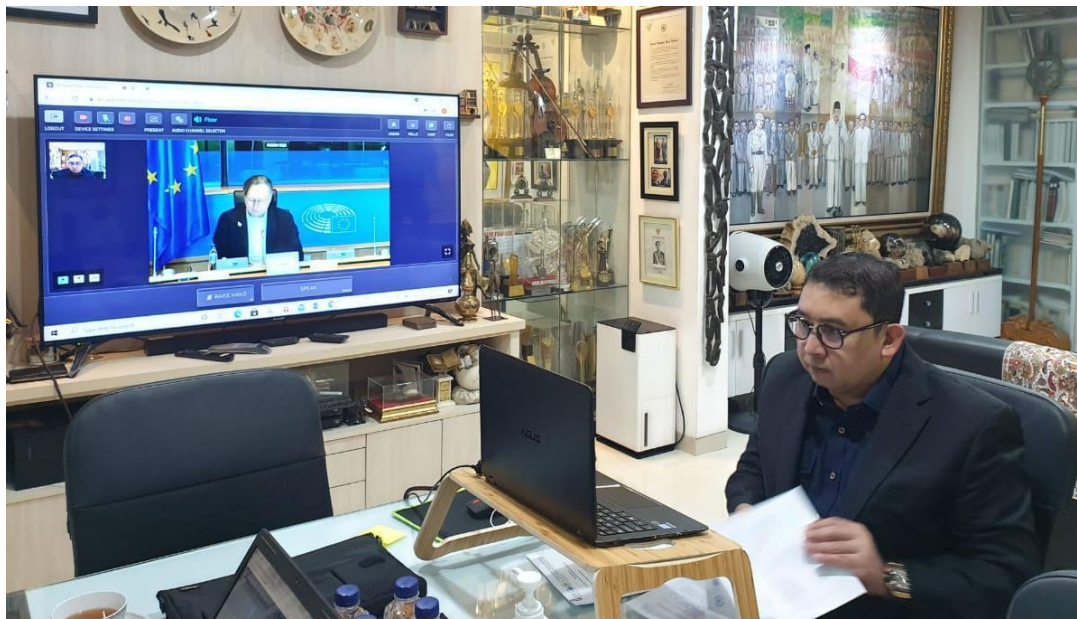
LAPORAN
Pertemuan *Virtual* “47th Session of the Steering Committee of
The Parliamentary Conference on the WTO”
15 April 2021
3-5 PM Central European Standard Time (CEST)

I. PENDAHULUAN

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Dr. Fadli Zon menghadiri Sesi ke-47 pertemuan *Steering Committee of the Parliamentary Conference on the WTO* (SC PCWTO), yang dilaksanakan secara daring pada tanggal 15 April 2021 dari Fadli Zon Library. Sesi ke-47 dari SC PCWTO yang dilaksanakan secara daring ini membahas mengenai penyelenggaraan Ministerial Conference of the WTO yang ke-12 (MC12), yang rencananya akan diselenggarakan pada tahun 2021 ini, berikut segala aspek yang harus menjadi perhatian bersama seperti isu-isu apa saja yang kiranya akan mengemuka, serta pembatasan-pembatasan sehubungan dengan Pandemi COVID-19.

Disamping itu agenda lainnya dari Sesi ke-47 ini adalah diskusi interaktif dengan Direktur Jenderal WTO yang baru yaitu, Dr. Ngozi Okonjo-Iweala dari Nigeria. Terpilihnya Dr. Ngozi Okonjo-Iweala yang merupakan Direktur Jenderal WTO wanita pertama membawa nuansa dan harapan baru bagi WTO, khususnya mengingat masih banyaknya negosiasi-negosiasi penting yang masih belum mencapai keputusan final seperti; Subsidi Perikanan, Isu Pertanian serta sejumlah isu baru seperti *e-commerce*. Sesi ke-47 ini dipimpin oleh Bernd Lange anggota Parlemen Eropa dan Manzoor Nadir dari Parlemen Guyana.

II. AGENDA ACARA
(terlampir)



III. SITUASI UMUM

Jalannya pertemuan adalah sebagai berikut:

1. Bernd Lange mengawali sesi ke-47 dengan menjelaskan bahwa MC 12 memang direncanakan untuk diselenggarakan pada tahun 2021 ini. Namun demikian, belum sepenuhnya jelas mengenai kapan waktu pasti dari pelaksanaannya dan apakah pelaksanaannya akan menggunakan metode pertemuan fisik seperti biasa atau tidak, mengingat Pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Kondisi ini tentunya berimbas kepada pelaksanaan PC WTO. Memang jika mempertimbangkan kondisi pandemi dan fakta bahwa semua negara anggota WTO telah selesai melaksanakan program vaksinasi, pertemuan fisik akan menjadi sebuah tantangan tersendiri. Akan tetapi tidak mudah untuk dapat menyelesaikan negosiasi-negosiasi yang masih berjalan melalui metode daring maupun *hybrid*, dan pelaksanaan negosiasi menggunakan metode tersebut tentunya tidak akan memuaskan bagi banyak pihak. Oleh karena itu, untuk memutuskan metode seperti apa kiranya yang nanti akan digunakan untuk pertemuan PC WTO sebelum MC 12, diberikan kesempatan kepada para anggota parlemen yang hadir pada Sesi ke-47 ini untuk menyampaikan pendapatnya. Opsi yang sementara ada adalah pelaksanaan PC WTO secara daring selama satu atau dua hari untuk mendiskusikan beberapa isu yang sekiranya akan mengemuka pada pembahasan di MC12.
2. Helmut Scholz anggota Parlemen Eropa dari Jerman mengusulkan agar PC WTO diselenggarakan secara daring beberapa minggu sebelum pelaksanaan MC12, sehingga hal-hal yang diputuskan bersama pada PC WTO bisa diserahkan sebagai sebuah rekomendasi kepada MC12. Sementara itu Tan Buon, juga anggota Parlemen Eropa dari Perancis

mengusulkan untuk mengadakan pertemuan secara fisik. Memang saat ini di Perancis sebagaimana halnya di seluruh dunia sedang mengalami sejumlah pembatasan pergerakan karena pandemi. Akan tetapi, mungkin saja keadaan bisa menjadi lebih baik seiring berjalannya waktu. Usulan dari Helmut Scholz untuk pelaksanaan secara daring juga didukung oleh Rajiv Pratap Rudy anggota Parlemen dari India, sedangkan Chen Fuli dari Kongres Rakyat Tiongkok menyampaikan pendapat yang senadda dengan Tan Buon yaitu melaksanakan pertemuan secara fisik. Chen juga mengusulkan agar salah satu isu yang akan dibahas pada PC WTO mendatang adalah mengenai isu agrikultur. Beberapa anggota Parlemen lainnya yang juga menyampaikan pendapatnya adalah Sara Matthieu dari Belgia yang mengusulkan pertemuan daring dengan isu seperti perdagangan internasional paska pandemi serta pengabaian sementara dari Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) terkait dengan kebutuhan medis. Kemudian ada Simon Sven dari Jerman yang juga menyampaikan pentingnya pembahasan mengenai TRIPS.

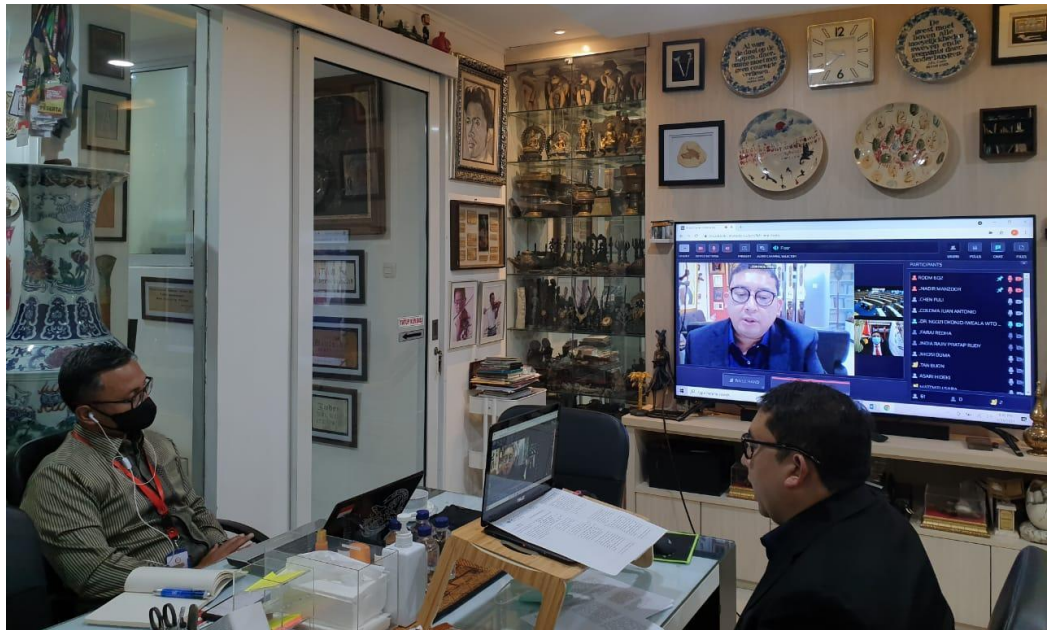
3. Terkait dengan pembahasan metode pelaksanaan PC WTO yang akan datang, Ketua BKSAP DPR RI Dr. Fadli Zon berpandangan bahwa dengan program vaksinasi yang saat ini sedang berlangsung di sebagian besar negara anggota WTO dan mengingat pentingnya negosiasi, serta kesulitan teknis dan infektivitas jika diskusi dilaksanakan secara daring, maka diusulkan agar PC WTO dapat diselenggarakan secara fisik, tentunya dengan tetap memperhatikan perkembangan situasi terkait Pandemi COVID-19, menerapkan pembatasan untuk jumlah orang yang dapat hadir untuk setiap delegasi, serta menerapkan protokol kesehatan yang ketat setiap saat.
4. Helmut Scholz juga berpandangan bahwa selain pentingnya PC WTO untuk tetap diselenggarakan pada tahun ini, penting juga untuk menyelenggarakan WTO Public Forum guna mendiskusikan lebih mendalam mengenai perlunya restrukturisasi kebijakan perdagangan internasional di bawah akibat dampak dari Pandemi COVID-19, serta mendapatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait hal tersebut. Menanggapi usulan dari Helmut Scholz, pimpinan Sesi ke-47 Bernd Lange menyatakan bahwa sejatinya Public Forum akan tetap diselenggarakan sebelum MC12, yaitu sekitar bulan September, sekitar tanggal 28 atau 30. Hal-hal teknis lainnya menyangkut pelaksanaan Public Forum akan ditentukan kemudian, dan akan diusulkan melalui sebuah proposal yang dapat dibahas lebih lanjut, khususnya berkaitan dengan metode pelaksanaannya, apakah fisik atau *hybrid*, pembicara dari Inter-Parliamentary Union (IPU), pembicara dari Parlemen Eropa,

serta kemungkinan untuk mengundang pakar dan ahli yang memiliki kapabilitas untuk berbicara sesuai topik.

5. Pembahasan mengenai pelaksanaan PC WTO serta Public Forum ini kemudian menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut; Pertama, PC WTO tetap akan dilaksanakan sebelum pelaksanaan MC12. Jika ada usulan terkait topik bahasan apa yang sekiranya perlu di diskusikan lebih lanjut agar segera mengirimkan usulan ke sekretariat PC WTO. Yang kedua, WTO Public Forum tetap akan diselenggarakan pada bulan September. Namun demikian teknis pelaksanaannya, apakah akan ada pertemuan fisik atau daring, belum ditentukan dan akan mempertimbangkan situasi Pandemi serta masukan dari anggota-anggota SC PC WTO yang lainnya. Setelah keputusan dibacakan, Sesi ke-47 di istirahatkan sejenak untuk kemudian dilanjutkan diskusi bersama Direktur Jenderal WTO yang baru.
6. Dr. Ngozi Okonjo-Iweala dari Nigeria adalah perempuan pertama yang menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) WTO. Hal ini dipandang sebagai semangat baru bagi kebanyakan anggota WTO, khususnya bagi negara-negara berkembang dan negara-negara kurang berkembang. Mengawali sambutannya di Sesi ke-47 SC PCWTO, Dr. Iweala menegaskan kembali pentingnya peran Parlemen bagi WTO. Sebagai wakil rakyat Parlemen memiliki tugas penting yaitu salah satunya ialah menyusun undang-undang. Tugas penting tersebut berkaitan erat dengan aturan-aturan perdagangan internasional yang banyak dibahas serta disepakati di WTO. Dr. Iweala juga menegaskan bahwa WTO akan terus bekerja sama dengan Parlemen, guna mendapatkan masukan terkait dengan isu-isu perdagangan internasional dan negosiasi-negosiasi yang sampai dengan saat ini belum selesai di WTO, terutama di tengah Pandemi COVID-19 seperti saat ini yang menyebabkan dampak yang luar biasa bagi ekonomi dan perdagangan dunia. Menurut Dr. Iweala Parlemen memiliki peran penting dalam mendiskusikan, menginformasikan sekaligus membentuk persepsi global untuk sebuah sistem perdagangan internasional yang lebih baik lagi.
7. Dirjen WTO juga menjelaskan bahwa WTO dan perdagangan secara umum memiliki kontribusi penting yang bisa diberikan guna membantu memerangi krisis yang diakibatkan oleh Pandemi COVID-19 tersebut, diantaranya dengan membantu terciptanya akses yang lebih cepat ke vaksin COVID-19, pasokan medis untuk membantu pemulihan ekonomi global, serta menurunkan biaya transisi rendah karbon. Dirjen WTO menerangkan bahwa di masa pandemi ini kondisi ekonomi akan membaik hanya apabila program vaksinasi yang saat ini telah berjalan di sebagian negara, bisa dengan cepat berjalan di sebagian negara lainnya

juga. Rencana stimulus ekonomi yang terbaik yang bisa dilakukan saat ini adalah dengan menjalankan rencana vaksinasi dengan baik. Oleh karena itu akses kepada vaksin menjadi penting untuk bisa diakses oleh semua pihak. Disamping itu fokus WTO pada MC12 yang akan datang selain vaksin adalah negosiasi perikanan yang telah berlangsung cukup lama, tetapi belum mencapai kesepakatan hingga saat ini.

8. Dirjen WTO juga menyatakan bahwa dirinya sangat prihatin dengan isu vaksin, dan baru-baru ini telah mengadakan pertemuan yang membahas mengenai vaksin, serta apa yang dapat disumbangkan WTO untuk meningkatkan produksi vaksin, terutama di pasar negara berkembang dan negara berkembang. Dirjen WTO menegaskan bahwa tidak ada orang dan tidak ada negara seharusnya dibiarkan berada di belakang antrian ketika kita memiliki vaksin yang dapat menyelamatkan nyawa.
9. Lebih jauh, Dirjen WTO menyampaikan bahwa untuk MC12 yang direncanakan pada akhir tahun 2021 ini, terdapat beberapa agenda yang akan menjadi prioritas untuk dapat terselesaikan. Agenda yang akan menjadi prioritas tersebut antara lain adalah negosiasi subsidi perikanan yang telah berlarut-larut tidak selesai selama 20 tahun. Menurut Dirjen WTO, 20 tahun adalah waktu yang sudah terlalu lama untuk membiarkan isu ini tidak terselesaikan, sementara sebenarnya isu tersebut sangat mempengaruhi hidup masyarakat pada umumnya, nelayan pada khususnya, serta menciptakan ketersediaan pangan yang berkelanjutan.
10. Kemudian agenda prioritas yang kedua adalah mengenai perdagangan dan kesehatan, kemudian isu agrikultur yang sangat penting bagi negara-negara berkembang dan negara-negara kurang berkembang. Kemudian juga isu-isu baru seperti *e-commerce* yang justru mengalami pertumbuhan pesat di masa pandemi sebagai alternatif perdagangan baru. Banyak yang diuntungkan dari *e-commerce* terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di negara-negara berkembang. Oleh karena itu, isu seperti *e-commerce* ini harus dibicarakan bersama agar tercipta peraturan global yang kemudian disepakati oleh semua pihak, dapat mengaturnya lebih jauh. Hal ini karena aktifitas *e-commerce* telah mengakibatkan adanya perpindahan data dan juga barang melampaui perbatasan antar negara. Namun demikian, pembicaraan mengenai perlunya peraturan *e-commerce* tersebut harus juga memperhatikan adanya *digital divide* antara negara maju dengan negara kurang berkembang. Dirjen WTO menegaskan bahwa MC12 yang akan datang harus menargetkan dua atau tiga isu dapat terselesaikan dengan baik misalnya isu subsidi perikanan, agrikultur serta perdagangan dan kesehatan.



11. Dalam diskusi interaktif dengan Dirjen WTO tersebut, Ketua BKSAP Dr. Fadli Zon berkesempatan untuk menyampaikan tanggapannya terkait dengan pemilihan Dirjen WTO yang baru serta harapan dan perhatian Indonesia pada MC12 yang akan datang. Ketua BKSAP menyampaikan selamat atas terpilihnya Dr. Ngozi Okonjo-Iweala sebagai Direktur Jenderal WTO yang baru dan mengapresiasi visi dan strateginya selaku Direktur Jenderal WTO dalam menghadapi tantangan perdagangan global. Diampaikan pula bahwasanya Indonesia optimis dengan terpilihnya Direktur Jenderal yang baru akan membawa semangat baru bagi organisasi WTO, di tengah banyaknya tantangan global terhadap Sistem Perdagangan Multilateral dan negosiasi yang sedang berlangsung yang perlu segera diselesaikan.
12. Lebih jauh Ketua BKSAP juga menyampaikan bahwa tantangan besar lain yang sedang dihadapi dunia pada masa pandemi ini adalah, bagaimana mencapai keseimbangan antara mendorong pertumbuhan ekonomi kembali dan mencapai target pembangunan berkelanjutan. Kedua hal ini sama pentingnya dan harus dicapai. Untuk itu, DPR berpandangan bahwa keseimbangan antara pemulihan ekonomi pasca pandemi dan pencapaian target pembangunan berkelanjutan dapat terwujud, jika perundingan yang sedang berlangsung saat ini dapat diselesaikan dalam Konferensi Tingkat Menteri ke-12 (MC12), dengan mengakomodasi kepentingan terbaik semua anggota WTO, khususnya negara berkembang dan negara kurang berkembang.
13. Ketua BKSAP juga menambahkan bahwa Prinsip dasar dari keberlanjutan atau *sustainability* adalah, bahwa kita meneruskan kepada generasi berikutnya persediaan sumber daya yang setidaknya

sama produktifnya dengan persediaan yang kita miliki saat ini. Sejalan dengan hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia berpandangan bahwa penting dalam Konferensi Tingkat Menteri ke-12 (MC12) untuk dapat mencapai kesepakatan di bidang pertanian/agrikultur, khususnya yang berkaitan dengan *Public Stockholding for food security purposes* dan *Special Safeguard Mechanisms*. Negosiasi yang sedang berlangsung dan belum final saat ini sangat diharapkan dapat diselesaikan dengan memperhatikan kepentingan negara berkembang dan negara kurang berkembang.

14. Tercapainya kesepakatan dalam negosiasi mengenai pertanian maupun subsidi perikanan akan memberikan ruang kebijakan yang lebih luas bagi pemerintah, untuk melaksanakan berbagai kebijakan guna mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan serta pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan bagi petani kecil dan miskin yang penting bagi negara berkembang dan negara kurang berkembang. Di masa kritis seperti inilah, menjaga keseimbangan antara menghormati sistem perdagangan internasional, dan memenuhi kebutuhan stok publik menjadi keharusan bagi negara berkembang dan negara kurang berkembang, karena kita tidak dapat memprediksi krisis atau pandemi seperti apa yang akan terjadi di masa depan. Bagi negara-negara ini, pada saat-saat sulit, menciptakan ketahanan dan kedaulatan pangan berarti juga menyelamatkan nyawa rakyat. Sebagaimana diketahui, Indonesia memiliki kepentingan agar negosiasi subsidi perikanan dan negosiasi pertanian dapat segera selesai dan mencapai kesepakatan dengan tetap memperhatikan kepentingan negara berkembang dan negara kurang berkembang.
15. Menanggapi Ketua BKSAP, Dirjen WTO menyampaikan bahwa apa yang disampaikan terkait keseimbangan antara mengembalikan ekonomi agar menjadi hidup kembali dan pada saat yang bersamaan juga berupaya untuk memenuhi target pembangunan berkelanjutan, merupakan hal yang penting untuk dipikirkan dan ditindaklanjuti oleh WTO. Oleh sebab itulah dirinya berpandangan bahwa WTO perlu terlibat aktif dalam merumuskan kebijakan vaksin global serta penting bagi negosiasi-negosiasi seputar subsidi perikanan dan pertanian untuk dapat segera mencapai kesepakatan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Sesi ke-47 SC PCWTO yang berlangsung secara daring pada tanggal 15 April 2021 berlangsung dengan cukup interaktif baik pada saat pembahasan teknis mengenai pelaksanaan PCWTO dan Public Forum tahun ini, maupun pada saat diskusi dengan Direktur Jenderal WTO. Adapun Sesi ke-47 ini menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut:
 - a. PCWTO tetap akan diadakan sebelum berlangsungnya MC12. Bagi para anggota Parlemen yang ingin mengajukan usulan isu untuk dibahas pada acara tersebut agar segera mengirimkan usulan tertulis ke sekretariat PCWTO. Metode pelaksanaan acara akan ditentukan kemudian sesuai dengan situasi Pandemi COVID-19.
 - b. WTO Public Forum tetap akan diadakan pada akhir September yaitu sekitar bulan September, sekitar tanggal 28 atau 30. Hal-hal teknis lainnya menyangkut pelaksanaan Public Forum akan ditentukan kemudian. Adapun tema besar dari WTO Public Forum ini adalah “Trade Beyond COVID-19: Building Resilience”.
2. Secara garis besar Direktur Jenderal WTO yang baru yaitu Dr. Ngozi Okonjo-Iweala dapat dikatakan memiliki perhatian khusus terhadap negosiasi-negosiasi yang belum selesai, terutama yang terkait dengan kepentingan negara berkembang dan negara kurang berkembang, seperti negosiasi subsidi perikanan dan negosiasi pertanian. Hal ini diharapkan dapat membantu melancarkan proses negosiasi yang belum selesai untuk kedua isu tersebut.
3. Pandangan Indonesia mengenai pentingnya untuk menjaga keseimbangan antara upaya pemulihan ekonomi paska pandemi dengan memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan yang disampaikan oleh Ketua BKSAP pada Sesi ke-47 SC PCWTO, dapat diterima dengan baik oleh Direktur Jenderal WTO. Pandangan tersebut selaras dengan visi dan strategi Direktur Jenderal WTO, untuk segera menyelesaikan negosiasi-negosiasi yang berkaitan erat dengan kepentingan negara berkembang dan negara kurang berkembang.

B. SARAN

BKSAP DPR RI dapat mengirimkan usulan tertulis ke Sekretariat PCWTO mengenai isu-isu apa saja yang kiranya menarik untuk di

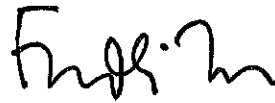
diskusikan lebih lanjut pada PCWTO atau pada WTO Public Forum mendatang.

V. PENUTUP

Demikianlah pokok-pokok Laporan SC PC WTO 47 pada tanggal 15 April 2021 disusun, untuk dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dokumen yang terkait akan dijadikan lampiran. Terima kasih.

Jakarta, 16 April 2021

Ketua Badan Kerja Sama
Antar Parlemen,



Dr. Fadli Zon, S.S., M.Sc. ¶

A-86

LAMPIRAN

PARLIAMENTARY CONFERENCE ON THE WTO

Organized jointly by the Inter-Parliamentary Union and the European Parliament

Forty-seventh session of the Steering Committee

15 April 2021, 3-5 pm CEST

Virtual meeting

PROVISIONAL AGENDA

1. Adoption of the agenda

2. Interactive discussion with the new Director-General of the WTO

During this exchange, WTO Director-General, Dr. Ngozi Okonjo-Iweala (TBC), will share her vision and strategies for addressing the challenges for both sustainable global trade and the WTO itself. She will also provide an update on the preliminary arrangements for the 12th Ministerial Conference.

The Members of the Steering Committee will then share their expectations regarding cooperation with the WTO during her tenure.

3. Preliminary discussion on possible activities of the Parliamentary Conference on the WTO in the second half of the year

The members of the Steering Committee will discuss:

- *possible participation in and topic for a parliamentary panel at the WTO Public Forum*
- *possible activities in view of the WTO 12th Ministerial Conference, which will take place during the week of 29 November, taking into account current situational constraints.*

Members of the Steering Committee will be invited to share their perspectives and expectations related to the parliamentary priorities for MC12 and global trade during the post-COVID-19 era.

4. Any other business

PARLIAMENTARY CONFERENCE ON THE WTO

Organized jointly by the Inter-Parliamentary Union and the European Parliament

Selected key issues for the Twelfth WTO Ministerial Conference

Due to the delays imposed by the COVID-19 pandemic, the Twelfth WTO Ministerial Conference (MC12) will be the first such event in four years. As a result, a considerable number of issues have arisen that will need to be addressed. This paper aims to outline some of the issues that will likely be key during the conference.

Negotiations on fisheries subsidies

Concluding these negotiations – the first multilateral agreement in years – could be a key deliverable for MC12. There are still significant gaps between WTO members' positions that need to be bridged but negotiations are at a more advanced stage than at any other point. The main outstanding issues at this point relate to special and differential treatment for developing countries, as well as the measuring, classification, and control of subsidies. A successful conclusion of the negotiations would be a major contribution to the achievement of Sustainable Development Goal 14.6.

E-Commerce negotiations

Although it is unlikely that the negotiations on the e-commerce plurilateral agreement will be completed before MC12, progress has been made in a number of key areas such as electronic signatures, digital trade facilitation, customs tariffs, "spam", open government data, open internet access and source code. Discussions at MC12 could give a substantial impetus to the conclusion of these negotiations. The tariff waiver on electronic transmissions, which is due to expire, will also have to be renewed during the conference.

Services domestic regulation

Plurilateral negotiations on services domestic regulation were launched at MC11 in Buenos Aires in 2017. Their goal is not to increase market access for services but to arrive at a framework that would make it easier for providers to make use of the commitments already in existence and without any form of discrimination. Open questions relate in particular to financial services, the length of phase-in periods, and special and differential treatment. An agreement on these issues could be reached at MC12.

Investment facilitation for development

The on-going plurilateral negotiations on investment facilitation for development have the highest number of participants – currently 105 WTO members. As in the services domestic regulation talks, the goal of the initiative is to ensure transparency and due process for foreign investors. Major new market access commitments or special protections for foreign investors are not being discussed. Open issues include, among other, visa facilitation for investors, sustainability standards, and the firewall between this agreement and other investment protection treaties.

Trade and health

The COVID-19 pandemic has shown the critical role international trade plays in protecting the world against public health threats. In November 2020, the Ottawa Group on WTO reform proposed a Trade and Health Initiative whereby the WTO would tackle the issue of trade in essential medical goods in a structured way with focus on export restrictions, technical barriers to trade, tariffs, and transparency. On-going discussions on intellectual property rights and other issues relating to the pandemic are similarly likely to feed into the discussions at MC12.

Trade and Gender

At the Eleventh WTO Ministerial Conference, a Joint Declaration on Trade and Women's Economic Empowerment was signed and is now supported by 127 WTO members and observers. This declaration led to the establishment of the Informal Working Group on Trade and Gender in 2020, which will focus its activities on reviewing gender-related analytical work, experience sharing on increasing the participation of women in trade, consideration of the concept and scope for a “gender lens” and how it could apply to the work of the WTO, and support for the WTO Aid for Trade work programme. The working group thus aims to follow up on the declaration in a structured way and contribute concrete elements for the discussion at the Twelfth Ministerial Conference.

Other areas of reform

In addition to the above-mentioned areas of negotiations which have advanced considerably, WTO members are likely to put other major issues on the agenda of MC12. These could include: the continuing blockage of appointments to the appellate body, and thus appellate body reform; the calls by some countries for modernizing rules on industrial subsidies; special and differential treatment; and the future of plurilateral initiatives.



**47th Session of the Steering Committee of
the Parliamentary Conference on the WTO**
15 April 2021, 3-5 PM Central European Standard Time (CEST)
Virtual Meeting

AGENDA	SUGGESTED INTERVENTION
1. Adoption of the Agenda	
2. Interactive discussion with the New Director General of the WTO. Her Excellency Dr. Ngozi Okonjo-Iweala will share her vision and strategies for addressing challenges for both sustainable global trade and the WTO itself. She will also provide an update on the preliminary arrangements for the 12th Ministerial Conference.	<i>Her Excellency Director General of the WTO, Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, Honorable Members of the Steering Committee, Good Afternoon ... and good evening here in Indonesia,</i> First of all allow me, on behalf of the House of Representative of the Republic of Indonesia to congratulate you on your election as the director general of the WTO. We also would like to thank you for the sharing your vision and strategies in addressing challenges to global trade and the WTO. We are optimistic that your election will bring new spirit to this organization, amidst many global challenges to Multilateral Trade System and ongoing negotiations that needs to be finalized immediately. Another great challenge that the world is facing in this critical time is probably on how to strike a balance between pushing the



**47th Session of the Steering Committee of
the Parliamentary Conference on the WTO**
*15 April 2021, 3-5 PM Central European Standard Time (CEST)
Virtual Meeting*

	economic growth back post the pandemic and the fulfillment of the sustainable development agenda. These two things are equally important and must be achieved. To that end, the Indonesian House is of the view that a balance between post-pandemic economic recovery and meeting sustainable development targets can be realized, if the current ongoing negotiations can be resolved in the 12th Ministerial Conference, by accommodating the best interests of all WTO members particularly the developing countries and least developed countries. Once again thank you excellency, for the valuable insights that you have shared.
3. Preliminary discussion on possible activities of the Parliamentary Conference on the WTO in the second half of the year • Discussion on participation in and topic for a parliamentary panel at the WTO Public Forum.	Thank you for the opportunity, In my opinion it would be very insightful that we discuss not only on issues that are on negotiation, but also on issues like e-commerce or investment facilitation for development in the upcoming parliamentary panel at the WTO Public Forum.



47th Session of the Steering Committee of the Parliamentary Conference on the WTO

*15 April 2021, 3-5 PM Central European Standard Time (CEST)
Virtual Meeting*

- Discussion on possible activities in view of the 12th WTO Ministerial Conference on 29 November, taking into account the current situational constraints.
- Perspectives and expectations related to the parliamentary priorities for the 12th Ministerial Conference and global trade during the post COVID-19 era.

With the ongoing vaccination programs in most country and bearing in mind the importance of the negotiations, as well as technical difficulties and infectivity of having online negotiations, in my opinion the 12th Ministerial Conference can be held physically with limitations regarding the number of people present in each delegation and with imposing strict health protocols at all times.

The principle of sustainability is that we pass on to the next generation a stock of resources that is at least as productive as the stock we have today. In line with this, the Indonesian House is of the view that it is important for the 12th Ministerial Conference, to reach an agreement in agricultural issues related to Public Stockholding for food security purposes and Special Safeguard Mechanisms, as well as the Fisheries Subsidies. It is highly expected that the ongoing negotiations would be concluded and take into account the best interests of all WTO members, particularly the developing countries and least developed countries.

Such agreement would provide greater policy space for the Government to carry out various policies to realize food security and sovereignty as well as poverty reduction through empowerment programs for small and poor farmers, which is important for developing countries and least developed



**47th Session of the Steering Committee of
the Parliamentary Conference on the WTO**
15 April 2021, 3-5 PM Central European Standard Time (CEST)
Virtual Meeting

	countries. It is in critical times like this, that maintaining the balance between respecting requirement of international trade system and fulfilling the need of public stock become imperatives for developing countries and least developed countries, as we cannot predict what sort of crisis or pandemic that may lies ahead in the future. For these countries, in times of difficulties food security and sovereignty would means saving lives.
4. Any other business	